

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agusmidah, 2011, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum. PT. Softmedia, Medan.

Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief Sidharta, Bernard, 1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju, Bandung.

Departemen P & K, 1989, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Husaini, Purnomo Setiadi et. al, 1996. Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir , 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pound, Roscoe, 1981, *Law and society*, Prentice Hal, New Jersey.

Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta.

....., 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Kompas, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J., 2011, Manajemen Hubungan Industrial, Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono et. al, 1982, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Radjawali, Jakarta,

....., 2011, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D., Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwarto, 2003. Hubungan Industrial Dalam Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta.

Tanya, Bernard L, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta publishing, Yogyakarta

Tjandra, Riawan, 2010, Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Wijayanti, Asri, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005

Setiaji, Bambang et. al, 2001 : Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktitas Sektor Industri di Indonesia , Riset Hibah Bersaing, DP2M Depdiknas RI, Jakarta

Suparjan et. al, 2002, Kebijakan Upah Minimum Yang Akomodatif, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 1410-4946, Volume 5.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Budiyono, 2007, Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaannya, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Makalah/Pidato

Rekson Silaban " Upaya Menciptakan Upah Minimum Yang Adil dan Rendah Konflik", Seminar pengupahan Kadin Batam, 18 April 2012

Rahardjo, Satjipto, "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", Harian Kompas, 15 Juni 2002.

Internet

<http://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/>

www.legalitas.org, “Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum menjadi Sebenar Ilmu”, www.docstoc.com/docs/32531813/Teori-Hukum-I-Diani-final-10Nop

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 *jo* Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak.